

Ganjar Tengahi Sengketa Balai Kota

● Lima Aset Belum Dibalik Nama
SEMARANG - Dua kepala daerah, yakni Wali Kota Tegal, Ikmal Jaya dan Bupati Tegal, Enthus Susmono hadir di kantor gubernuran, Jl Pahlawan, Semarang untuk memenuhi undangan Pemprov Jateng yang hendak memfasilitasi sengketa tanah Balai Kota Tegal.

Gubernur Ganjar Pranowo menengahi langsung sengketa tanah seluas 29.250 meter persegi tersebut. "Rupanya ada proses administrasi yang sudah lama tidak terselesaikan, tepatnya sejak 1988. Seluruh dokumen sudah ada di kota (Pemkot Tegal)," katanya saat ditemui di gedung Gradhika Bakti Praja, kom-

pleks gubernuran, Rabu (5/3).

Pihaknya meminta pemkot supaya segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan mengirimkan surat ke Pemkab Tegal. Kedua belah pihak diminta saling surat menyurat dalam penyelesaian persoalan tersebut.

"Ada data yang tidak dimiliki

kabupaten, temuan BPK nanti supaya segera di-follow up. Saya minta mereka saling surat menyurat, mudah-mudahan tidak terlalu lama bisa terselesaikan," jelasnya.

Tak Ada Pemagaran

Ganjar juga mengklarifikasi tidak ada upaya pemagaran di lahan Balai Kota Tegal. "Tidak ada, itu hanya perlu penjelasan proses administrasinya saja yang perlu segera diurus," ungkapnya.

Dalam audiensi tersebut, Enthus datang terlambat. Adapun, Ikmal menegaskan, gubernur telah memberikan jalan keluar untuk penyelesaian sengketa dan balik nama aset milik Kota Tegal yang diklaim jadi kepunyaan Pemkab Tegal.

Menurut dia, gubernur telah memerintahkannya segera membuat surat ke pemkab agar bisa mengeluarkan surat pernyataan

bahwa lima aset yang ada di Kota Tegal benar-benar tidak masuk dalam neracanya.

"Asetnya sudah tercatat oleh Pemkot Tegal dalam neraca, tetapi sertifikatnya masih atas nama Pemkab Tegal," ucap Ikmal.

"Asisten pemerintahan Kabupaten Tegal saat mediasi menyatakan, Kabag Umum Pemkab Tegal pernah dua kali menerima pembayaran dari Kota Tegal. Hanya, dokumennya masih dalam pencarian," tandasnya.

Setelah ada surat pernyataan dari pemkab yang menyebutkan kelima aset tidak masuk neraca, maka proses balik nama bisa segera dilakukan BPN Kota Tegal. Namun, bila Pemkab Tegal tidak bersedia membuat surat pernyataan, maka gubernur kembali akan melakukan mediasi.

Menurut dia, aset-aset tersebut sudah dilakukan penyerahan fisik, material, dan finansial. Hal itu dibuktikan berita acara yang ditan-datangani Bupati, Wali Kota Tegal dan Pembantu Gubernur Peka-longan saat itu. Adapun, proses administrasi belum dilaksanakan.

Dalam kesempatan itu, Enthus membantah akan memagar di atas lahan Balai Kota Tegal. Ia hanya berupaya melakukan pematokan di asetnya. Bukan hanya di Balai Kota Tegal, ia pun melakukan pematokan di lahan aset pemkab di Tembalang, Semarang.

Enthus mengakui masalah ini nantinya akan diselesaikan lewat surat menyurat. Meski pemberitaan sengketa ramai diberitakan media, ia menilai hubungannya dengan Ikmal baik-baik saja. (J17,H45,H68-15,48)